

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Anggarkan Rp 1,7 M, Bentuk 11 Perda

SEMARANG-DPRD Jateng berkomitmen membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat Jateng. Dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp 1,7 miliar.

Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Windarto mengatakan, tahun 2018 setidaknya sudah ada 11 produk perda yang dihasilkan. "Kami tidak hanya berbicara kuantitas, tetapi kualitas. Bagaimana perda yang dihasilkan bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jateng," kata Yudi saat mengisi Dialog Bersama Parlemen "Mekanisme Pembentukan Perda" di Hotel Noormans, Selasa (6/11) kemarin.

Ia menambahkan, selama menjadi ketua Bapemperda, sudah ada 30-an perda yang telah dihasilkan. Dijelaskan perda tersebut merupakan produk hukum untuk mengatur

daerah. Diakuinya, jumlah perda sangat banyak karena DPRD ingin ada aturan di semua lini kehidupan masyarakat. "Sebagai contoh perda mengenai pendidikan, tata ruang wilayah, perumahan, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan perda, DPRD bersama Pemprov Jateng melalui dinas terkait dan pihak-pihak lainnya terus berupaya agar optimal di masyarakat," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan untuk menghasilkan

produk perda tidak sebentar dan harus melalui kajian matang. Penyusunannya bisa dilakukan dari pihak eksekutif dan inisiasi dari DPRD. Dari situ, dibuat naskah akademik yang dibantu dari pihak akademis dan

profesional. Biasanya, penyusunan perda selama 160 hari. "Dengan begitu, perda yang dihasilkan nanti benar-benar sudah dikaji dari semua sisi sehingga nantinya bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Kepala Biro Hukum Setda Jateng, Indrawasih mengatakan pembentukan perda itu dapat diketahui oleh masyarakat. Pada 2017, ada 77 perda yang dihasilkan. "Jadi, dalam perda itu, memang ada inisiatif dari eksekutif dan legislatif," katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunannya, Biro Hukum mendorongnya agar perda selesai tepat waktu, selama 160 hari. Sementara terkait dengan anggaran dalam pembentukan perda, dilihat dari kajian yang dilakukan saat penyusunannya. Pada tahun ini, anggarannya sekitar Rp 1,7 miliar untuk evaluasi dan implementasi perda. (fth/ida)